

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan

Pengungkapan adalah informasi yang disediakan untuk optimalisasi kebutuhan operasi pasar modal yang efisien. Menurut Nuswandari (2009:73) Tujuan pengungkapan yaitu untuk memberikan informasi yang dirasa perlu disampaikan untuk memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan untuk mencapai tujuan dari pelaporan keuangan. Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* bahwa tujuan pelaporan keuangan yaitu menyediakan informasi bagi investor, kreditor, dan pemakai eksternal lain untuk mengambil keputusan investasi, kredit dan lainnya.

Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui dua media, yaitu media bentuk finansial yang berbentuk laporan tahunan dan media non finansial yang dapat dilakukan dengan jumpa pers. Kelengkapan informasi dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah sangat berpengaruh pada masyarakat, investor maupun pengguna laporan keuangan lainnya. Laporan keuangan yang lengkap dapat lebih menarik minat dan perhatian public serta mempermudah masyarakat atau pihak lain dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan.

Menurut Chariri & Ghazali, (2003:17), pengungkapan dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*)
Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan otoriter. Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pengungkapan wajib digunakan untuk mencegah pemakai laporan keuangan dari informasi yang dapat menyesatkan.
- b) Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)
Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang tidak diharuskan oleh peraturan yang ditetapkan, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan penggunaannya. Pengungkapan sukarela menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, sehingga membantu para investor untuk memahami

strategi bisnis perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi.

Menurut (Chariri & Ghazali, 2003:19), terdapat tiga konsep pengungkapan, yaitu :

- a. Pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*)
Pengungkapan yang cukup merupakan pengungkapan yang mengandung jumlah minimal pengungkapan sesuai tujuan pelaporan keuangan agar tidak menyesatkan pengambilan keputusan.
- b. Pengungkapan yang wajar (*fair disclosure*)
Pengungkapan yang wajar merupakan pengungkapan yang menunjukkan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan.
- c. Pengungkapan yang lengkap (*full disclosure*)
Pengungkapan yang lengkap merupakan pengungkapan informasi laporan keuangan secara lengkap dan relevan dengan batasan biaya dan materialitas.

Menurut Arifin (2012:29) Pengungkapan harus bisa memberikan tambahan informasi bukannya mengurangi karena tekanan yang terlalu rinci atau sulit dianalisis. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus bisa memberikan informasi informasi atas kinerja keuangan pemerintah yang relevan, akurat, konsisten, tepat waktu dan dapat dipercaya. Laporan keuangan pemerintah disajikan secara lengkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis yang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban, kontijensi, dan komitmen-komitmen lainnya.

2.1.2 *Intergovernmental Revenue*

Menurut Standar akuntansi pemerintahan *Intergovernmental revenue* adalah pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai operasional daerah. *Intergovernmental revenue* disebut juga dana perimbangan. Menurut Santri (2006:35) *Intergovernmental revenue* merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal. Tujuan dana perimbangan, sebagai berikut:

- a) Untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan anggaran pembangunan yang memadai
- b) Untuk mengintensifikasikan aktifitas dan kreatifitas perekonomian masyarakat daerah yang berbasis pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah
- c) Untuk mendukung terwujudnya good governance, tata pemerintahan yang baik
- d) Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis, efektif dan efisien

Menurut Cahyat (2004:47) pada pemerintahan desentralisasi ini, pengawasan pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah seharusnya dapat lebih efektif. Pengawasan oleh pemerintah pusat dilakukan dengan membentuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas internal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas eksternal. *Intergovernmental revenue* berasal dari APBN yang terdiri atas :

- a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut PP No. 55 Tahun 2005, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari :

 - 1) Pajak, meliputi :
 - a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - c) PPh WPOPDN (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri) dan PPh Pasal 21
 - 2) Sumber daya alam, meliputi :
 - a) Kehutanan
 - b) Pertambangan umum
 - c) Perikanan
 - d) Pertambangan minyak bumi

- e) Pertambangan gas bumi
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
Menurut PP No 55 Tahun 2005, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan pembagian proporsinya dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Menurut PP No 55 Tahun 2005, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK digunakan untuk membiayai pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memiliki unsur ekonomi panjang. DAK juga dapat digunakan untuk pembiayaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

2.1.3 Leverage

Menurut Andriky (2015), *Leverage* diartikan sebagai “Rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal”.

Menurut Minarsih (2015) didalam sektor publik, rasio utang atau *leverage* sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio ini digunakan untuk untuk bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini juga mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Jika rasio ini tinggi, maka pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang dan harus dicari jalan untuk mengurangi utang.

2.1.4 Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah dapat dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Tahar & Zakhiya (2011:23) tujuan PAD yaitu memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dengan memberikan pendanaan untuk mengembangkan potensi daerahnya sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.

Menurut Sudarsana (2013:17) definisi Pendapatan Asli Daerah adalah:

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah untuk melaksanakan pengembangan dan pembangunan daerahnya serta mengurangi tingkat ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Sumber-sumber penerimaan PAD menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 6, yaitu :

a) Pajak daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 definisi pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Terdapat 2 jenis pajak daerah, yaitu :

1) Pajak provinsi, meliputi :

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b) Bea balik bama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah

2) Pajak kabupaten/kota, meliputi :

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C5
- g) Pajak parkir

b) Retribusi daerah

Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2000, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat 3 jenis retribusi daerah, yaitu :

- 1) Retribusi jasa umum, meliputi :
 - a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu
 - b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
 - c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
 - d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
 - e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
 - f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, seta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan
 - g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik

- 2) Retribusi jasa usaha, meliputi :
 - a) Retribusi jasa bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu
 - b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah

- 3) Retribusi perizinan tertentu, meliputi :
 - a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
 - b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
 - c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan

- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berbentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang merupakan badan usaha yang dibentuk oleh daerah yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian daerah agar dapat meningkatkan penghasilan daerah. Jenis pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi :

 - 1) Bagian laba perusahaan milik daerah
 - 2) Bagian laba lembaga keuangan daerah
 - 3) Bagian laba lembaga keuangan non bank
 - 4) Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

Contoh BUMD yang pada umumnya dimiliki oleh daerah yaitu :

- 1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
 - 2) Bank Pembangunan Daerah (BPD)
 - 3) Badan kredit kecamatan
 - 4) Pasar
 - 5) Tempat hiburan/rekreasi
 - 6) Villa atau pesanggrahan
 - 7) Lain-lain keuntungan yang menjadi penghasilan bagi daerah yang bersangkutan
- d) Lain-lain PAD yang sah
- Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber lainnya. Pendapatan ini berasal dari pendapatan yang tidak termasuk dalam pajak daerah dan retribusi daerah atau lain-lain milik pemerintah daerah yang sah dan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah. Jenis-jenis dari lain-lain PAD yang sah meliputi :
- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
 - 2) Penerimaan jasa giro
 - 3) Penerimaan bunga deposito
 - 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah

Menurut Soekarwo (2003:18) terdapat tiga cara untuk mengoptimalkan PAD, yaitu :

- a. Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada, dalam arti operasional pemungutannya. Contoh : Pengawasan, tertib administrasi dan mengupayakan wajib pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak.
- b. Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.
- c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara. Sehingga perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Namadan TahunPeneliti	JudulPenelitian	VariabelPenelitian	HasilPenelitian	Persamaan	Perbedaan
Wulandari Arum 2016	FaktorFaktor yang Mempengaruhi PengungkapanBelanjaBantuanSosialPadaLaporanKeuanganPe merintah Daerah Kabupaten/Kota Yogyakarta Tahun 2012-2014	X ₁ : <i>Intergovernmental Revenue</i> X ₂ : Kekayaan Daerah X ₃ : Pembiayaan Utang X ₄ : JumlahPenduduk Y : PengungkapanBelanja BantuanSosial	<i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh signifikan terhadap PengungkapanBelanjaBantuanSosial, Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap PengungkapanBelanjaBantuanSosial, Pembiayaan Utangtidakberpengaruh terhadap PengungkapanBelanjaBantuanSosial, JumlahPenduduk berpengaruh signifikan terhadap PengungkapanBelanjaBantuanSosial	1. Menelitidengan menggunakan variabel independent yang samayaitu <i>Intergovernmental Revenue</i> , Kekayaan Daerah. 2. Menelitidengan menggunakan variabel dependent yang samayaitu Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial	1. Variabel independent yang berbedadari penelititerdahuluyaitu Jumlah Penduduk. 2. Objekpenelitianterdahuluyaitupemerintahdaerahkabupaten/kota di Yogyakarta, sedangkanpenelitiankabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Retnowati Reny 2016	Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintahan Daerah, Leverage Dan <i>Intergovernmental Revenue</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2013)	X_1 : Tingkat Kekayaan Daerah X_2 : Belanja Daerah X_3 : Ukuran Pemerintahan Daerah X_4 : Leverage X_5 : <i>Intergovernmental Revenue</i> Y : Kinerja Keuangan Daerah	Belanja Daerah dan Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja keuangan daerah, sedangkan Tingkat kekayaan daerah, leverage, <i>intergovernmental revenue</i> tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan daerah	1. Meneliti dengan menggunakan dua variabel independen yang samayaitu <i>Intergovernmental Revenue</i> dan <i>Leverage</i> .	1. Variabel independent yang berbedadari penelititerdahuluyaitu Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintahan Daerah, 2. Variabel dependent yang berbedadari penelititerdahuluyaitu Kinerja Keuangan Daerah. 3. Objek penelitianterdahuluyaitupemerintahdaerahkabupaten/kotadi Jawa
---------------------------	---	--	---	--	--

					Tengah, sedangkan penelitian kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
Praptining sihDwiSy awaltikaF ebryani 2014	FaktorFaktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa Tahun 2014.	X ₁ : Opini Audit X ₂ : Karakteristik Ukuran Daerah X ₃ : <i>Intergovernmental Revenue</i> X ₄ : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran X ₅ : Kemandirian Daerah X ₆ : Spesialisasi Pekerjaan Y : Belanja Bantuan Sosial	Opini audit, Karakteristik pemerintah daerah, dan spesialisasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap Belanja Bantuan Sosial sedangkan Intergovernmental revenue, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan Kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial	1. Meneliti dengan menggunakan satu variabel independen yang samayaitu <i>Intergovernmental Revenue</i>	1. Variabel independent yang berbedadari penelititerdahuluyaituOpini Audit, Karakteristik Ukuran Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Kemandirian Daerah, Spesialisasi Pekerjaan 2. Objek penelitianterdahuluyaitupemerintahdaerahkabupaten/kot

					a di pulau Jawa, sedangkan penelitian kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
Lesmana Sigit I 2010	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.	X_1 : Ukuran Pemerintah Daerah X_2 : Kewajiban X_3 : Pendapatan Transfer X_4 : Umur Pemerintah Daerah X_5 : Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) X_6 : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Y : Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Umur pemerintah daerah dan Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Pengungkapan wajib LKPD, sedangkan Ukuran pemerintah daerah, Kewajiban, Pendapatan transfer, Jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib LKPD	1. Meneliti dengan menggunakan variabel dependen yang samayaitu Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Variabel independent yang berbedadari peneliti terdahulu yaitu Ukuran Pemerintah Daerah, Kewajiban, Pendapatan Transfer, Umur Pemerintah Daerah, Jumlah SKPD 2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah

					abupaten/kota di Yogyakarta, sedangkan penelitian kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
Darmasuti Dewi, Setyaningrum Dyah 2009	FaktorFaktor yang Mempengaruhi PengungkapanBelanjaBantuanSosialPadaLaporanKeuanganPe merintah Daerah PadaTahun 2009	X ₁ : KapasitasFiskal X ₂ : Legislature Size X ₃ : DiferensiasiFungsional X ₄ : SpesialisasiPekerjaan X ₅ : UkuranPemerintah Daerah X ₆ : UmuradministratifPemerintah Daerah X ₇ : RasioKemandirianKeuangan Daerah X ₈ : Pembiayaan Utang X ₉ : <i>Intergovernmental Revenue</i> Y :	Legislature Size RasioKemandiriankeuanga daerah, <i>Intergovernmental revenue</i> berpengaruhsignifikanpositifterhadapPengungkapanBelanja BantuanSosial, sedangkanKapasitasFiskal, Diferensiasifungsional, Spesialisasipekerjaan, Ukuranpemerintahdaerah, Umuradministratifpemerintahdaerahtidakberpengar	1. Menelitidenganmenggunakanvariabelindependen yang samayaitu <i>Intergovernmental Revenue</i> 2. Menelitidenganmenggunakanvariabel dependent yang samayaituPengungkapan Belanja Bantuan Sosial	1. Variabel independent yang berbedadari penelititerdahuluyaituKapastias Fiskal, Legislature Size, Diferensiasi Fungsional, Spesialisasi Pekerjaan, Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Admnistratif Pemerintah Daerah, Rasio

		Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada LKPD pada tahun 2009	u terhadap Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial		Kemandirian Keuangan Daerah 2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah Republik Indonesia sedangkan penelitian kabupate n/kota di Sumatera Selatan.
Setyowati Lilis 2008	Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X ₁ : Aset X ₂ : Kekayaan X ₃ : Diferensiasi Fungsional X ₄ : <i>Debt</i> X ₅ : <i>Intergovernmental Revenue</i> X ₆ : Pembangunan Manusia Y : Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Aset berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kekayaan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Diferensiasi Fungsional tidak berpengaruh signi	1. Meneliti dengan menggunakan tiga variabel independen yang samayaitu Kekayaan Daerah, <i>Debt</i> dan <i>Intergovernmental Revenue</i>	1. Variabel independent yang berbedadari penelititerdahuluyaitu Aset, Diferensiasi Fungsional, dan Pembangunan Manusia 2. Objek penelitian terdahulu

			<p>fikanterhadapPe ngungkapanLapo ranKeuanganPe merintah Daerah, <i>Debt</i>tidakberpen garuhterhadapPe ngungkapanLapo ranKeuanganPe merintah Daerah,<i>Intergove rnmental Revenue</i>tidakber pengaruhterhada pPengungkapan BelanjaBantuanS osial Pembangunan Manusia berpengaruhterh adapPengungkap anLaporanKeuan ganPemerintah Daerah</p>		<p>yaitupemeri ntahdaerahR epublik Indonesiase dangkanpen elitikabupate n/kota di Sumatera Selatan.</p>
--	--	--	---	--	---

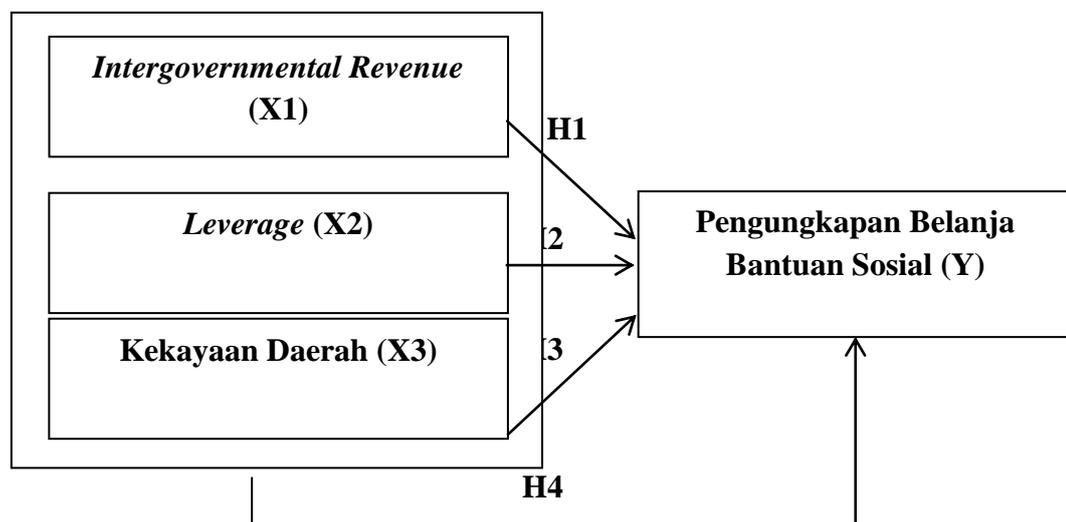
2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh *intergovernmental revenue*, *Leverage*, kekayaan daerah terhadap pengungkapan belanja bantuan sosialmaka penulismencobamenguraikandalambentukkerangkaikiranpada gambar 2.1.

Semakin besar *intergovernmental revenue* mendorong pemerintah daerah meningkatkan pengungkapan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya berasal dari pihak eksternal.

Organisasi dengan level pembiayaan utang yang tinggi akan diminta untuk menerbitkan pengungkapan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum. Maka dari itu *leverage* digunakan untuk menggambarkan struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat dilihat tingkat risiko tidak terbayarnya suatu utang.

Tingkat kekayaan suatu daerah dapat dilihat melalui jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin besar pendapatan yang diterima daerah, maka semakin besar pengungkapan yang harus dilakukan dalam laporan keuangannya.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan secara

tepat objek yang akan diteliti dan memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yaitu *Intergovernmental Revenue* (X1), *Leverage* (X2), *Kekayaan Daerah* (X3) terhadap variabel dependen yaitu Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial (Y) baik secara simultan maupun parsial.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis peneliti. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- H₁: Diduga *Intergovernmental Revenue* berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial
- H₂: Diduga *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial
- H₃: Diduga *Kekayaan Daerah* berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial
- H₄: Diduga *Intergovernmental Revenue*, *Leverage*, dan *kekayaan daerah* berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.